

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004)

Arikuntoro Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian BOT*, (Jakarta, 1997)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Aspek-Aspek Hukum Kontrak Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur Dengan Pola BOT (Build, Operate, and Transfer)*, (Jakarta, 2008)

Meliala Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)

Merna Tony & N. J. Smith, *Guide to the Preparation and Evaluation of Build Own Operate Transfer (BOOT) Project Tenders 2nd ed*, Hongkong: Asia Law and Practice Ltd., 1996

Moran Theodore H. (ed), *International Political Risk Management*, MIGA Washington DC: The World Bank Group, 2001

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)

Mulyadi Kartini dan Gunawan Wijaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1984)

Pujianto Bambang dkk, *Analisis Potensi Penerapan Kerja Sama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005)

Santoso Budi, *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operate and Transfer)*, (Solo: Genta Press, 2008)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1990)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005)

Sudaryat, *Legal Officer*, (Bandung: Oase Media, 2008)

Syahrani Riduan, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992)

B. BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/KMK.06/2007 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Panduan Umum Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
248/KMK.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap
Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian
Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer*).

C. JURNAL

Algabili Muhammad Zea, Budi Santoso, dan Hendro Saptono. 2016. *Pelaksanaan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya)*. Semarang: Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 4, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 13 September 2017.